



---

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018**

---



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
JANUARI 2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Dinas**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh berkerja berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata kerja Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh terdiri dari 38 PNS dan 10 orang sumber daya manusia Tenaga harian lepas (THL) dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

## 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan PNS

**Tabel 1.1**  
**Distribusi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	7 Orang
3	III	19 Orang
4	IV	12 Orang
<b>Total</b>		<b>38 Orang</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 38 Orang ASN, 13 Orang merupakan Penyuluh Keluarga Berencana (ASN Fungsional). Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa kecukupan jumlah SDM Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk beroperasi dengan baik masih sangat kurang terutama dari segi jumlah staf, keadaan Per 31 Desember 2018 terdapat kekurangan untuk pengisian staf terutama staf di Sub Bagian Program dan Keuangan sebanyak 4 (empat) Orang yang terdiri dari staf Pengelola Gaji, staf perencanaan, staf pelaporan dan evaluasi, disamping itu juga terdapat kekurangan staf 3 (tiga) orang di bidang lainnya. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kecukupan tenaga staf operasional yang membantu pejabat struktural masih jauh dari cukup sehingga sangat berpengaruh pada pelaksanaan operasional Dinas sehari-hari.

b. Berdasarkan Pendidikan PNS.

Selanjutnya, dipandang dari sisi lulusan tenaga yang ada di Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Berencana Kota Payakumbuh tahun 2018, penyebaran skill tenaga masih sangat senjang. Tenaga lulusan S1 dan S2 yang tercantum dibawah ini sebanyak 16 orang hanya bisa untuk memenuhi tenaga structural dan sebagian staf, sementara yang lainnya sebagai penopang pekerjaan masih belum memadai.

**Tabel 1.2**  
**Distribusi PNS Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan Pendidikan.**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	1 Orang
2	SLTA	7 Orang
3	D2	-
4	D3	7 Orang
3	D4	-
4	S1	21 Orang
5	S2	2 Orang
<b>Total</b>		<b>38 Orang</b>

c. Berdasarkan jabatan

Menurut jabatan, tenaga operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh lebih didominasi oleh Tenaga Fungsional yang difungsikan sebagai Penyuluh Keluarga Berencana. Penjelasmnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Distribusi PNS Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan Eselon**

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	4	Kepala Bidang
3	Eselon IV	11	Kasi/ Kasubag
4	Fungsional Umum	9	Staf
5	Fungsional	13	PKB
JUMLAH		38	

Selanjutnya, untuk pelaksanaan operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh , pada tahun 2018 dibantu dengan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 10 orang yang berfungsi sebagai :

- a) Pramubakti Kesekretariatan DP3A&P2KB 6 orang
- b) Pramubakti PKK Kota Payakumbuh 2 orang.
- c) Pramubakti GOW Kota Payakumbuh 1 orang.
- d) Pramubakti DW Kota Payakumbuh 1 orang.

## 2. Sumber Daya Peralatan (aset)

### a. Gedung Kantor

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh bertempat di Jalan Balai Polam No 2 Kel. Tanjung Gadang, Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Ruangan yang tersedia Cukup representatif untuk menampung operasional perkantoran secara keseluruhan. Ruangan yang tersedia saat ini terdiri atas ruang Kepala Dinas, ruang Sekretaris, ruang Program dan Keuangan, ruang Kepala Bidang ( 3 ruangan), Ruang kasubag Umum dan Kepegawaian, ruang Alkon dan KB, ruang Pengurus Barang / Penyimpanan ATK, ruang Aula Pertemuan, dan Mushalla.

**Tabel 1.4**  
**Distribusi Ruang Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan Peruntukan, Tahun 2018.**

NO	JABATAN	Ukuran	KETERANGAN
1	Ruang Kepala Dinas	Representatif	Tersendiri
2	Ruang sekretaris	Representatif	Tersendiri
3	Ruang Kasubag Program dan Keuangan	Cukup Representatif	Tersendiri
4	Ruang Kasi Bidang PP Bidang KB dan staf masing-masing	Cukup Representatif	Bergabung
5	Ruang Kasubag Umum Kepegawaian	Representatif	Tersendiri
6	Ruang Kabid PA	Representatif	Tersendiri
7	Penyimpanan Alkon KB	Representatif	Tersendiri
8	Ruang Pengurus Barang	Cukup Representatif	Tersendiri
9	Mushalla	Representatif	Tersendiri

Melihat kepada jumlah ruangan yang tersedia sebagaimana tergambar pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan ruangan operasional sudah cukup memadai.

**b. Peralatan Kerja**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mengemban 2 urusan, antara lain urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menjalankan urusan tersebut sebagaimana mestinya, sangat dibutuhkan peralatan yang memadai. Sumber Daya Fasilitas adalah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang merupakan Aset / Modal Usaha dan juga lembaga/ mitra kerja yang masih ber-operasional terdiri dari :

1) Sarana Fisik

Sarana/ fasilitas fisik terdiri dari tanah, bangunan dan tiang papan iklan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dengan rincian keadaan hingga akhir 2018 adalah :

**Tabel 1.5**  
**Distribusi Sarana Fisik DP3A&P2KB Kota Payakumbuh,**  
**Tahun 2018**

No.	Uraian	Luas	Nilai (Rp.)	Kondisi
1	Tanah Kantor di Tanjung Gadang	1.000 m2	96.530.000	Baik
2	Tanah Kantor di Sawah Padang	812 m2	178.990.000	Baik
3	Gedung kantor di Tanjung Gadang	378 m2	757.497.000	Baik
4	Mushalla di Tanjung Gadang	25 m2	36.000.000	Baik
5	Gedung Kantor PKK di Sawah Padang	180 m2	354.380.000	Baik
6	Aula PKK di Sawah Padang	105 m2	223.579.999	Baik
7	Rumah Dinas Penjaga di Sawah Padang	33 m2	47.520.000	Baik
8	Gedung Posyandu di Parit Rantang	36 m2	52.707.000	Baik
9	Gedung Posyandu di Labuh Basilang	36 m2	52.707.000	Baik
10	Gedung Posyandu di Balai Betung	36 m2	52.707.000	Baik
11	Gudang Alat Kontrasepsi di Kubu Gadang	42 m2	145.165.000	Baik
12	Balai Penyuluhan KB di Kec. Payakumbuh; Barat,Utara,Timur, Selatan,dan Latina	50 m2/Kecamatan	933.595.000	Baik
13	Tiang Baliho Iklan KB di Jalan Raya Kel. Balai Nan Duo	1 m2	39.825.000	Baik
14	Aula DP3AP2KB	106 m2	166.812.000	Baik
<b>J U M L A H</b>			<b>3.138.014.999</b>	

## 2) Sarana/ Peralatan Kantor

Adalah sarana yang digunakan untuk keperluan perkantoran, berupa kendaraan dinas roda empat sebanyak 8 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 43 unit, mebeuleir, komputer, pengeras suara, laptop dan berbagai peralatan/ perlengkapan untuk aktivitas perkantoran lainnya.

## 3) Alat-alat kedokteran

Alat-alat kedokteran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana yang di distribusikan ke 39 klinik – klinik KB di Kota Payakumbuh. Alat-alat kedokteran tersebut adalah ; IUD Kit, Implant Kit, Obgyn Bed dan Implant Removal Kit.

## 4) Potensi /Mitra Kerja DP3A&P2KB yang terdiri dari :

PKK, Posyandu, Tim Koordinasi PMT-AS, GOW, Dharmawanita Persatuan, Bundo Kanduang, IKD, PKK Kecamatan (5 Kecamatan), BKB, BKR, BKL, BLK, UUPKS, PIK-R/M, Kader KB, Pokja PUG, Forum Anak, P2WKSS, P2TP2A, GSI, Gugus Tugas KLA.

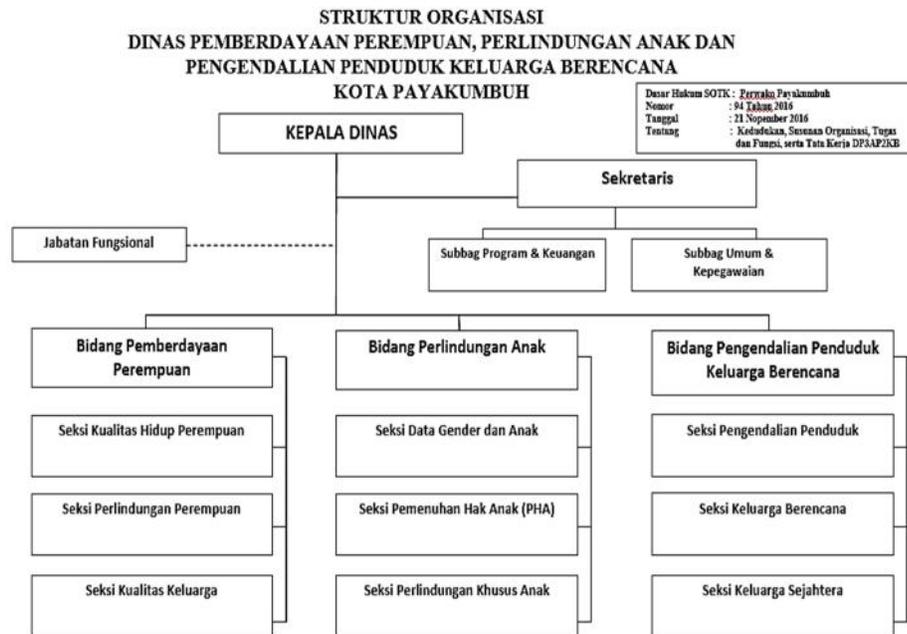
### 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menjalankan tugas pokok dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**

#### 1.4 Isu Strategis

Identifikasi isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana di Kota Payakumbuh yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.
2. Belum optimalnya pencapaian kategori Kota Layak Anak.
3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.  
Hal ini ditandai dengan belum optimalnya peran P2TP2A dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana.

5. Belum optimalnya pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK.

## **1.5 Landasan Hukum**

LKJIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017.

## **1.6 Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  
serta Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. Rencana Strategis**

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dilakukan pasca penetapan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.

##### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Nomor : 21/SK/DP3AP2KB-PYK/II/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh

sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Payakumbuh Juara”.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah : **“MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”**.

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera, berkualitas dan mandiri.

## **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 6 (enam) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

**Visi : MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK**

TUJUAN	SASARAN
<b>MISI 1 : Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan berkelanjutan</b>	
1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan . (indikator tujuan : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG))	1. Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatnya implementasi kota Layak Anak 3. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
<b>MISI 2 : Mewujudkan Keluarga Berencana yang sejahtera , berkualitas dan mandiri.</b>	
2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk indikator tujuan : laju pertumbuhan Penduduk	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana 2. Meningkatnya cakupan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks/ Skor	Sesuai dengan Renstra K/L Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan IKU Kota Payakumbuh.	$1/3 \times (\text{Angka harapan hidup} + \text{angka harapan pendidikan} + \text{indeks distribusi pendapatan})$	BPS/ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender IDG)	Indeks/ Skor	Sesuai dengan Renstra K/L Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sasaran daerah Kota Payakumbuh.	$1/3 \times (\text{Indeks keterwakilan perempuan di parlemen} + \text{indeks pengambilan keputusan} + \text{indeks distribusi pendapatan})$	BPS/ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Indikator keberhasilan pencapaian Pemberdayaan Perempuan (kesetaraan Gender) dan sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	Capaian Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Meningkatnya Implementasi Kota layak Anak	Tingkat Kategori Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Indikator keberhasilan pencapaian Kota Layak Anak dan sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	Capaian Kategori Kota Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan ana, termasuk tindak pidana TPPO	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase	Sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan/jumlah perempuan*100	DP3AP2KB
		Persentase Kekerasan terhadap Anak	Persentase	Sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	Jumlah Kekerasan anak / jumlah anak*100	DP3AP2KB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase Penanganan Kasus terhadap Perempuan dan Anak	Persentase	Sesuai dengan sasaran daerah Kota Payakumbuh	Jumlah penanganan kasus/ jumlah seluruh kasus	DP3AP2KB
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Rasio Penggunaan Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalency Ratio (CPR)	Rata-rata penggunaan kontrasepsi	Sesuai dengan sasaran daerah Kota Payakumbuh	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dibagi jumlah seluruh PUS dikali 100	DP3AP2KB
5	Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase	Sesuai dengan sasaran daerah Kota Payakumbuh		DP3AP2KB
6	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	Sesuai dengan sasaran daerah Kota Payakumbuh	Penilaian dari Inspektorat	Inspektorat

### C. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,52
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,76
		Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama
2	Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Pratama
3	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan	0.092
		Persentase Kekerasan Terhadap Anak	0.061
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	95
4	Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	76.80
5	Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	74
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama PD dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja (out comes). Adapun rincian sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator

### **3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian**  
**Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks/skor	98.52	98.53	100,01
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks/skor	61.76	61.99	100.47
3	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	Utama	100
4	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Pratama	Pratama	100
5	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase	0.092	0.0395	157
6	Persentase Kekerasan terhadap Anak	Persentase	0.061	0.0385	137
7	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Persentase	95	100	105
8	Contraceptive Prevalence Rate Rate (CPR)	Rasio	76.80	69.07	89.93
9	Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase	74	74	100
10	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	Nilai	BB	A	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi / melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian kinerja 100.01%, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian kinerja 100.47%, Persentase Kekerasan terhadap Perempuan dengan capaian kinerja 157 %, Persentase Kekerasan terhadap Anak 137 %, Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan capaian kinerja 105 %

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA), Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat.

Capaian kinerja yang dibawah target ditunjukkan pada indikator Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dengan capaian kinerja 89.93%.

### **3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 6 ( enam ) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dari 6 (enam) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian**  
**Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018**

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks/skor	98.52	98.53	100.01
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks/skor	61.76	61.99	100.47
		Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	Utama	100
2.	Meningkatnya implementasi kota layak anak	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Pratama	Pratama	100
3.	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase	0.092	0.0395	157
		Persentase Kekerasan terhadap Anak	Persentase	0.061	0.0385	137
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Persentase	95	100	105
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Contraceptive Prevalence Rate Rate (CPR)	Rasio	76.80	69.07	89.93
5.	Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase	74	74	100
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	Nilai	BB	A	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 6 sasaran dan 10 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Misi 1 (kesatu) : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan berkelanjutan.

#### **Sasaran 1**

#### **Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan**

IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan tahun 2014-2019 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Di Indonesia, isu pengarusutamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Akses perempuan dalam bidang politik yang tercermin dari keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan nilai yang rendah. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Payakumbuh mencatat hanya sekitar 8 persen perempuan di parlemen (2 orang perempuan dibanding total 25 orang Anggota DPRD Kota Payakumbuh). Sedangkan dalam dunia kerja, profesionalisme perempuan semakin mendekati laki-laki.

Selanjutnya mengenai Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan sebuah penghargaan bergengsi sebagai apresiasi bagi kementerian/lembaga, Pemprov dan kabupaten/kota yang telah antusias mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara *online* mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak (PP-PA) dengan harapan semua *stakeholder* diharapkan dapat bekerja sama dan berkolaborasi menjadikan perempuan dan anak berada pada garis aman, mandiri, bermartabat dan berkualitas. Untuk pengukuran indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan Anugerah Parahita Ekapraya dilakukan kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS.

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Satuan	Tahun 2018		%	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2018 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Indeks Pembangunan Gender	N/A	Indeks/skor	98,52	98,53	100,01	99,62	99,91%
2	Indeks Pemberdayaan Gender	N/A	Indeks/skor	61,76	61,99	100,47	62,5	99,18%
3	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Kategori	Utama	Utama	100	Mentor	-
Rata-rata Capaian Kinerja						100.16		

Sasaran meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator : Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) merupakan indeks yang dihitung untuk menggambarkan ada atau tidaknya ketimpangan dalam pembangunan dari sudut pandang pembangunan gender. Penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan indeks sebagai berikut:  $1/3 \times (\text{Indeks keterwakilan perempuan di parlemen} + \text{indeks pengambilan keputusan} + \text{indeks distribusi pendapatan})$ . Angka ini menunjukkan indeks antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Pada tahun 2018 IPG kota payakumbuh ditargetkan 98,52 dan terealisasi sebesar 98,53. Penjelasan mengenai angka indeks adalah ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. IPG diukur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan BPS.

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Padang Sidempuan	95,56	96,24	96,57	97,29	97,63	97,09
Gunung Sitoli	...	82,46	86,22	87,69	89,41	89,58
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>91,98</b>	<b>92,82</b>	<b>92,98</b>	<b>93,02</b>	<b>94,04</b>	<b>94,74</b>
Kepulauan Mentawai	86,77	87,63	88,04	88,45	89,15	89,31
Pesisir Selatan	93,20	93,38	93,60	93,62	95,23	95,23
Solok	90,27	90,73	91,17	93,44	95,45	95,73
Sawah Lunto/Sijunjung	90,00	90,46	90,47	91,08	92,24	92,34
Tanah Datar	93,59	97,05	97,43	97,62	97,72	98,44
Padang Pariaman	92,33	92,34	92,53	92,90	93,04	93,15
Agam	94,54	94,89	96,38	96,68	96,69	97,04
Limapuluh Koto	91,74	91,97	92,69	93,82	95,77	95,50
Pasaman	91,76	91,99	92,11	92,14	92,88	92,95
Solok Selatan	91,12	91,18	91,23	91,27	94,84	95,33
Dharmas Raya	86,74	87,19	87,34	88,11	88,18	88,29
Pasaman Barat	86,20	87,33	87,55	88,09	88,41	88,44
Kota Padang	91,28	92,07	92,59	92,87	93,23	93,77
Kota Solok	96,03	96,37	96,38	96,47	96,51	96,62
Kota Sawah Lunto	88,20	90,98	93,52	94,84	95,40	95,52
Kota Padang Panjang	98,76	99,14	99,20	99,26	99,37	98,56
Kota Bukit Tinggi	97,94	98,47	98,73	98,99	99,21	99,75
Kota Payakumbuh	97,46	98,20	98,33	98,42	98,47	98,52
Kota Pariaman	96,17	97,16	97,69	98,12	98,58	98,72

**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Capaian IPG Kab/ Kota Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pencapaian IPG Kota Payakumbuh lebih tinggi dari IPG Kab/Kota lainnya, hal ini berarti kesetaraan gender dalam pembangunan kota payakumbuh lebih merata dibandingkan kawasan lain di Provinsi di Sumatera Barat. Meskipun angka IPG sudah relatif tinggi, namun bila dilihat dari masing-masing komposit indeks yang mengukur IPG masih terjadinya ketimpangan gender dilihat dari sisi indeks distribusi pendapatan antara laki-laki dibandingkan dengan perempuan yaitu 14.163 dan 12.485, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengurangi dan mengatasi ketimpangan tersebut.

Kode	Provinsi/Kab/Kota	AHH		EYS		MYS		engeluaran per Kapil		IPM		IPG
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1300	SUMATERA BARAT	66,94	70,70	13,53	14,38	8,86	8,60	14.446	9.379	74,62	70,26	94,16
1301	Kepulauan Mentawai	62,46	66,22	12,37	11,74	7,19	6,45	8.770	5.506	64,38	57,38	89,13
1302	Pesisir Selatan	68,23	72,16	12,99	13,63	8,49	8,09	11.614	8.441	72,14	68,52	94,98
1303	Solok	65,62	69,57	12,33	13,61	7,82	7,58	13.699	9.448	70,88	67,85	95,73
1304	Sijunjung	63,45	67,31	12,15	13,05	7,76	7,59	15.415	9.161	70,56	65,90	93,40
1305	Tanah Datar	67,07	71,03	12,65	14,15	8,14	8,21	12.224	9.810	71,28	70,22	98,51
1306	Padang Pariaman	65,92	69,88	12,86	14,21	7,54	6,99	15.800	9.559	72,51	68,01	93,79
1307	Agam	69,58	73,46	13,21	14,55	8,45	8,38	11.594	8.848	72,93	70,86	97,16
1308	Lima Puluh Kota	67,28	71,23	12,89	13,58	8,24	7,96	12.691	8.727	72,12	68,24	94,62
1309	Pasaman	64,54	68,44	12,20	13,42	7,87	7,59	11.363	6.848	68,55	63,75	93,00
1310	Solok Selatan	64,91	68,83	12,37	13,31	8,20	7,89	13.248	8.849	70,76	66,90	94,54
1311	Dharmasraya	68,42	72,35	12,05	12,50	8,66	8,22	16.674	7.366	74,82	66,16	88,43
1312	Pasaman Barat	65,23	69,06	12,48	13,39	8,15	7,56	12.876	6.238	70,71	62,91	88,97
1371	Kota Padang	71,24	75,15	15,72	16,39	11,62	11,26	20.657	12.536	85,67	80,33	93,77
1372	Kota Solok	70,96	74,77	13,94	14,73	10,78	11,18	14.893	10.861	79,65	77,02	96,70
1373	Kota Sawah Lunto	67,36	71,31	12,76	13,72	9,89	10,10	13.121	8.880	74,39	71,04	95,50
1374	Kota Padang Panjang	70,49	74,38	14,45	15,98	11,49	11,38	10.716	8.651	77,31	75,58	97,76
1375	Kota Bukittinggi	71,75	75,51	14,45	15,38	11,39	11,11	13.724	12.565	80,43	79,45	98,78
1376	Kota Payakumbuh	71,17	74,98	14,02	14,62	10,37	10,52	14.451	12.658	79,05	77,89	98,53
1377	Kota Pariaman	67,71	71,59	13,87	15,38	10,18	10,08	13.817	11.831	76,51	75,71	98,95

**Gambar 3.2**  
**Perbandingan Capaian IPG Kab/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pencapaian IPG Kota Payakumbuh lebih tinggi dari rata- rata IPG Kab/Kota Propinsi Sumatera Barat sebesar 94,16. Hal ini berarti kesetaraan gender dalam pembangunan kota payakumbuh lebih merata dibandingkan kawasan lain di Provinsi di Sumatera Barat. Meskipun angka IPG sudah relatif tinggi, namun bila dilihat dari masing-masing komposit indeks yang mengukur IPG masih terjadi ketimpangan gender dilihat dari sisi indeks distribusi pendapatan antara laki-laki dibandingkan dengan perempuan yaitu 14.451 dan 12.658. hal ini tidak berbeda jauh dengan kondisi pada tahun sebelumnya yang berkisar pada angka 14.163 dan 12.485. hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan upaya lebih intensif dan berkelanjutan untuk mengurangi dan mengatasi ketimpangan tersebut. Koordinasi antar Stakeholder terutama koordinasi dan kebijakan antar instansi pemerintah terkait perlu diselaraskan dan ditingkatkan.

2. Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. IDG dapat dihitung dengan rumus :  
 $1/3 \times (\text{Indeks keterwakilan perempuan di parlemen} + \text{indeks pengambilan keputusan} + \text{indeks distribusi pendapatan})$ . IDG diukur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan BPS. Pada tahun 2018 IDG ditargetkan sebesar 61,76 dan terealisasi sebesar 61,99.

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias Barat	15,00	47,34	50,32	70,04
Kota Sibolga	25,00	55,77	32,50	73,80
Kota Tanjung Balai	16,00	48,80	23,55	59,20
Kota Pematang Siantar	23,33	53,87	34,12	73,29
Kota Tebing Tinggi	8,00	55,24	29,66	56,82
Kota Medan	10,00	54,74	31,92	60,54
Kota Binjai	16,67	51,22	34,49	69,44
Kota Padang Sidempuan	13,33	51,68	30,44	61,95
Gunung Sitoli	12,00	37,84	41,09	63,67
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>9,23</b>	<b>56,75</b>	<b>36,40</b>	<b>62,42</b>
Kepulauan Mentawai	0,00	41,35	30,59	46,47
Pesisir Selatan	4,44	56,10	33,94	54,92
Solok	8,57	59,73	38,73	61,54
Sawah Lunto/Sijunjung	10,00	61,17	28,06	56,21
Tanah Datar	8,57	53,01	33,15	58,95
Padang Pariaman	5,00	43,09	31,07	53,26
Agam	2,27	58,46	38,47	54,35
Limapuluh Koto	8,57	64,82	27,67	51,68
Pasaman	5,71	57,50	38,48	59,70
Solok Selatan	0,00	59,02	36,47	49,59
Dharmas Raya	4,00	61,04	26,55	47,47
Pasaman Barat	2,50	58,60	36,35	53,57
Kota Padang	15,56	56,21	34,23	68,31

Kota Padang Panjang	20,00	67,17	46,60	73,30
Kota Bukit Tinggi	8,00	61,14	37,02	60,83
Kota Payakumbuh	8,00	57,33	37,82	61,70
Kota Pariaman	5,00	56,42	30,73	52,89

**Gambar 3.3**  
Perbandingan Capaian IDG Kab/ Kota Provinsi Sumatera Barat

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Keterlibatan perempuan di Parlemen	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
		(%)	(%)	(%)	
<b>1300</b>	<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>10,77</b>	<b>57,64</b>	<b>37,40</b>	<b>65,01</b>
1301	Kepulauan Mentawai	0,00	41,07	30,84	46,90
1302	Pesisir Selatan	4,44	63,48	34,05	53,46
1303	Solok	8,57	59,66	39,08	62,16
1304	Sijunjung	10,00	61,50	28,16	56,84
1305	Tanah Datar	8,57	59,15	33,42	58,41
1306	Padang Pariaman	5,00	51,55	31,10	54,48
1307	Agam	2,22	61,17	38,70	54,16
1308	Lima Puluh Kota	8,57	75,08	28,35	46,81
1309	Pasaman	8,57	55,10	38,33	63,78
1310	Solok Selatan	0,00	49,68	36,46	51,17
1311	Dharmasraya	4,00	57,19	26,76	48,91
1312	Pasaman Barat	2,50	57,33	36,36	54,42
1371	Kota Padang	15,56	53,25	34,51	69,01
1372	Kota Solok	5,00	62,44	36,19	56,20
1373	Kota Sawah Lunto	20,00	55,09	27,90	65,86
1374	Kota Padang Panjang	20,00	59,75	46,52	76,10
1375	Kota Bukittinggi	8,00	58,02	37,29	62,11
1376	Kota Payakumbuh	8,00	58,66	38,13	61,99
1377	Kota Pariaman	5,00	63,90	30,91	51,34

**Gambar 3.4**  
Perbandingan Capaian IDG Kab/ Kota Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan gambar 3.3 dan 3.4 dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada 2 elemen komposit indeks IDG, yaitu pada persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Disamping itu pencapaian IDG Kota Payakumbuh termasuk tinggi dari IDG Kab/Kota lainnya di Sumatera Barat dan

berada diatas rata rata pencapaian IDG Kab/Kota Propinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Payakumbuh sudah lebih baik dibandingkan dengan IDG Kab/ Kota lainnya. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Meskipun secara rata rata indeks Kota Payakumbuh sudah tinggi, apabila dilihat secara komposit penyusun indeks diketahui bahwa persentase keterlibatan perempuan di parlemen tergolong masih rendah dan berada dibawah rata rata persentase Propinsi Sumatera Barat. Apabila data pencapaian ini dibandingkan dengan Wilayah kawasan lain yaitu Jawa, IDG Kota Payakumbuh masih termasuk kondisi yang rendah. Sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh sebagai pengampu urusan, harus melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pencapaian IDG Kota Payakumbuh.

3. Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah antusias dan berkomitmen ,mengimplementasikan mendokumentasikan dan strategi yang terkait dengan PUG, termasuk perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan. menyampaikan informasi secara online mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan Penghargaan ini juga merupakan suatu bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian /Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Dalam pengimplementasiannya pelaksanaannya APE terdiri dari 4 kategori yaitu : Pratama, Madya, Utama, Mentor. Secara garis umum APE terdiri dari beberapa parameter sebagai berikut :
  1. Kelembagaan PUG (komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data, sistem informasi dan bahan informasi, metode dan tool, peran serta masyarakat dan dunia usaha).
  2. Pelaksanaan PUG (kebijakan, program dan kegiatan, kelembagaan dan pelayanan, anggaran, peran serta masyarakat dan jejaring)

Dalam rangka mewujudkan pencapaian parameter Kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG melibatkan perangkat daerah di Kota Payakumbuh, lembaga masyarakat, Perguruan tinggi, dan dunia usaha.



**Gambar 3.5 Piagam Penghargaan APE Kategori Utama Kota Payakumbuh Tahun 2018**



**Gambar 3.6 Tropi Penghargaan APE Kategori Utama Kota Payakumbuh Tahun 2018**



**Gambar 3.7 Walikota Payakumbuh menerima APE Tahun 2018**

Disamping itu kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mencapai APE adalah dengan menerapkan kebijakan 3 ends (akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri kekerasan terhadap anak, akhiri perdagangan orang). Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, trafficking. Pada tahun sebelumnya 2013 kota payakumbuh mendapatkan kategori pratama, pada tahun 2014 kategori madya dan pada tahun 2018 Kota Payakumbuh mendapatkan kategori Utama.

PERAIH PENGHARGAAN APE					
No	Kab/Kota	2013	2014	2016	2018
1	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-
2	Kab. Solok	-	-	-	-
3	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-
4	Kab. Agam	-	-	Pratama	Madya
5	Kab. Pesisir Selatan	-	-	-	Pratama
6	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	-	Pratama
7	Kab. Tanah Datar	-	-	-	Madya
8	Kab. Sijunjung	-	-	-	-
9	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-
10	Kab. Mentawai	-	-	-	-
11	Kab. Pasaman	-	-	-	Pratama
12	Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-
13	Kota Sawahlunto				Madya
14	Kota Payakumbuh		Madya	Utama	Utama
15	Kota Padang				Pratama
16	Kota Solok				Pratama
17	Kota Padang Panjang	Pratama	Madya		
18	Kota Pariaman	-	-	-	-
19	Kota Bukittinggi	Pratama	Madya	Utama	Utama
20	Provinsi Sumatera Barat	Pratama	Madya	Madya	Utama

**Gambar 3.8 Peraih penghargaan APE Kab./ Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018.**

Meskipun pencapaian APE Kota Payakumbuh masih mendapatkan pencapaian yang sama bukan berarti tidak ada kemajuan yang diperoleh Kota Payakumbuh Pada Tahun 2018. Berbagai upaya dan kebijakan terus dilakukan baik di Tingkat Pemerintah Kota Payakumbuh, Maupun di Tingkat OPD terus dilakukan agar pencapaian Kategori APE bisa ditingkatkan menjadi Kategori tertinggi yaitu kategori Mentor. Di Indonesia baru terdapat 4 Kabupaten yang mencapai kategori mentor yaitu Kab. Rembang, Kab. Wonosobo, Kab. Sleman, Kab. Gorontalo.

Disamping itu melalui dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator APE dilakukan hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyelarasan Komitmen, kebijakan yang berkaitan dengan APE, baik antar perangkat daerah melalui dokumen RPJMD, dan internal DP3AP2KB melalui dokumen Renstra. Renstra DP3AP2KB memastikan sarsaran, indikator, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian APE melauai Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan.

2. Melakukan penguatan kelembagaan PUG, melalui Pokja PUG, tim focal point, dan pelaksanaan Program Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang difokuskan kepada masing-masing perangkat daerah agar setiap perangkat daerah memperhatikan isu gender dalam perencanaan, seperti infrastruktur yg ramah gender dan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah yang tercermin dalam Anggaran Responsive Gender (ARG) melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
3. Melaksanakan randa PUG melalui Pelaporan data dukung pada B03 (Bulan ke 3), B06 (Bulan ke 6) ,B09 (Bulan ke 9),B12 (Bulan ke 12). Pelaporan data dukung ini dilaporkan secara online ke aplikasi Sistem Pemantauan KSP ke KSP (Kantor Staf Presiden).

Evaluasi pelaksanaan randa PUG tahun 2018 merupakan salah satu bentuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui 9 aksi penilaian pencapaian RANDA PUG dengan menginputkan data, informasi dan pelaporan data dukung dengan hasil sebagai berikut :

KAB/KOTA	AKSI									KRITERIA KEBERHASILAN			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH
<b>KAB. KEP. MENTAWAI</b>													
- B03	Tidak lapor	-	-	-	9								
- B06	X	X	X	Tidak lapor	X	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	-	-	5
- B09	X	X	X	Tidak lapor	X	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	-	-	5
- B12						Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	-	-	4
<b>KAB. PESISIR SELATAN</b>													
- B03	50	100	100	50	80	0	25	25	100	-	3	-	6
- B06	X	X	X	100	X	75	80	100	100		4	1	-
- B09	X	X	X	100	X	150	76	100	100	1	4	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KAB. SOLOK</b>													
- B03	100	100	100	10	100	25	83	83	Tidak lapor	-	6	-	3
- B06	X	X	X	100	X	100	100	100	100	-	5	-	-
- B09	X	X	X	100	X	100	76	100	100	-	5	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KAB. SIJUNJUNG</b>													
- B03	50	100	Tidak lapor	100	40	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	2	-	7
- B06	X	X	X	100	X	100	0	Tidak lapor	Tidak lapor	-	2	-	3
- B09	X	X	X	100	X	100	50	100	Tidak lapor	-	3	-	2
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KAB. TANAH DATAR</b>													
- B03	100	100	100	100	100	75	100	100	10	-	7	1	1
- B06	X	X	X	100	X	80	100	75	100	-	4	1	-
- B09	X	X	X	100	X	100	76	100	120	1	4	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-

KAB/KOTA	AKSI									KRITERIA KEBERHASILAN			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH
<b>KAB. PDG PARIAMAN</b>													
- B03	37	100	Tidak lapor	25	Tidak lapor	-	1	-	8				
- B06	X	X	X	100	X	100	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	2	-	3
- B09	X	X	X	Tidak lapor	X	Tidak lapor	30	Tidak lapor	Tidak lapor	-	-	-	5
- B12						100	100	Tidak lapor	100	-	3	-	1
<b>KAB. AGAM</b>													
- B03	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	9	-	-
- B06	X	X	X	100	X	100	100	100	100	-	5	-	-
- B09	X	X	X	100	X	120	30	Tidak lapor	120	2	1	-	2
- B12				100		100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KAB. LIMA PULUHKOTA</b>													
- B03	100	100	0	100	100	100	83	100	50	-	7	-	2
- B06	X	X	X	76	X	Tidak lapor	120	Tidak lapor	Tidak lapor	1	1	-	3
- B09	X	X	X	100	X	100	76	100	76	-	5	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KAB. PASAMAN</b>													
- B03	100	100	100	50	60	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	3	-	6
- B06	X	X	X	Tidak lapor	X	100	120	100	Tidak lapor	1	2	-	2
- B09	X	X	X	100	X	100	100	100	120	1	4	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KAB. SOLOK SELATAN</b>													
- B03	Tidak lapor	-	-	-	9								
- B06	X	X	X	Tidak lapor	X	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	-	-	5
- B09	X	X	X	Tidak lapor	X	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	-	-	5
- B12						Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	-	-	4

KAB/KOTA	AKSI									KRITERIA KEBERHASILAN			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH
<b>KAB. DHARMASRAYA</b>													
- B03	100	100	100	87	100	25	49	50	Tidak lapor	-	5	-	4
- B06	X	X	X	90	X	65	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	1	1	3
- B09	X	X	X	100	X	20	Tidak lapor	Tidak lapor	Tidak lapor	-	1	-	4
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KAB. PASAMAN BARAT</b>													
- B03	100	100	100	100	100	100	100	100	50	-	8	-	1
- B06	X	X	X	100	X	100	Tidak lapor	100	Tidak lapor	-	3	-	2
- B09	X	X	X	100	X	120	76	120	120	3	2	-	-
- B12						100	Tidak Lapor	Tidak lapor	100	-	2	-	2
<b>KOTA PADANG</b>													
- B03	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	9	-	-
- B06	X	X	X	100	X	75	100	100	100	-	4	1	-
- B09	X	X	X	100	X	100	100	100	100	-	5	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KOTA SOLOK</b>													
- B03	100	100	100	100	100	100	66	50	100	-	7	1	1
- B06	X	X	X	100	X	75	100	100	100	-	4	1	-
- B09	X	X	X	100	X	100	76	80	120	1	4	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KOTA SAWAHLUNTO</b>													
- B03	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	9	-	-
- B06	X	X	X	100	X	100	100	100	100	-	5	-	-
- B09	X	X	X	100	X	120	105	100	120	3	2	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KOTA PDG PANJANG</b>													
- B03	100	100	100	50	100	100	100	100	100	-	8	-	1
- B06	X	X	X	100	X	75	100	75	100	-	3	2	-
- B09	X	X	X	100	X	Tidak Lapor	120	100	100	1	3	-	1
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-

KAB/KOTA	AKSI									KRITERIA KEBERHASILAN			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH
<b>KOTA BUKITINGGI</b>													
- B03	100	100	100	100	100	75	100	100	100	-	8	1	-
- B06	X	X	X	100	X	100	100	100	100	-	5	-	-
- B09	X	X	X	100	X	120	120	100	120	3	2	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KOTA PAYAKUMBUH</b>													
- B03	100	100	100	100	100	0	100	100	100	-	8	-	1
- B06	X	X	X	100	X	100	100	100	100	-	5	-	-
- B09	X	X	X	100	X	100	120	100	100	1	4	-	-
- B12						100	100	100	100	-	4	-	-
<b>KOTA PARIAMAN</b>													
- B03	100	100	100	Tidak lapor	40	50	Tidak lapor	50	50	-	3	-	6
- B06	X	X	X	10	X	75	80	100	100	-	3	1	1
- B09	X	X	X	50	X	100	76	76	50	-	3	-	2
- B12						100	100	100	Tidak lapor	-	3	-	1
<b>JUMLAH (CHECKPOINT B03)</b>	Total Aksi : 9 Aksi x 19 Kab/Kota = 171 Aksi									-	103	3	65
<b>JUMLAH (CHECKPOINT B06)</b>	Total Aksi : 5 Aksi x 19 Kab/Kota = 95 Aksi									2	58	8	27
<b>JUMLAH (CHECKPOINT B09)</b>	Total Aksi : 5 Aksi x 19 Kab/Kota = 95 Aksi									17	52	-	26
<b>JUMLAH (CHECKPOINT B12)</b>	Total Aksi : 4 Aksi x 19 Kab/Kota = 76 Aksi									-	64	-	12

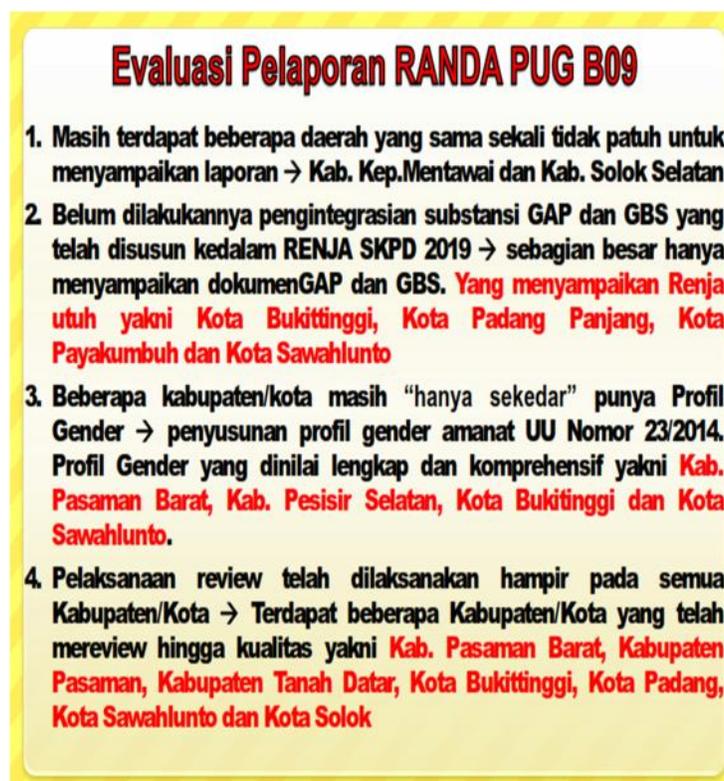
Gambar 3.9 Perbandingan pencapaian RANDA PUG

**KET :**

- Aksi 1.** Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota
- Aksi 2.** Pembentukan *Focal Point* pada seluruh OPD Kabupaten/Kota
- Aksi 3.** Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota setiap tahunnya
- Aksi 4.** Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada masing-masing OPD Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Barat
- Aksi 5.** Pembentukan Tim Penggerak /*driver* PPRG Kabupaten/Kota
- Aksi 6.** Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota setiap tahunnya
- Aksi 7.** Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota
- Aksi 8.** Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten/Kota
- Aksi 9.** Review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota

**Gambar 3.10 Rencana Aksi Randa PUG**

Berdasarkan gambar 3.9 dapat diketahui bahwa Kota Payakumbuh telah berkomitmen dan memiliki kesungguhan dalam mengikuti evaluasi Randa PUG, hal ini ditandai dengan tingginya kriteria Tingkat keberhasilan Rencana Aksi Randa PUG Kota Payakumbuh. Dari 9 Rencana Aksi yang di nilai, Kota Payakumbuh berhasil memenuhi 8 rencana aksi. Disamping itu berdasarkan data dan informasi pada gambar tersebut juga disimpulkan bahwa Kota Payakumbuh termasuk berada di Posisi terdepan dalam pencapaian evaluasi randa pug. bila dibandingkan dengan kabupaten kota disekitar. Kota Payakumbuh dijadikan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah lainnya di Propinsi Sumater Barat tentang pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui 9 aksi penilaian pencapaian RANDA PUG



**Gambar 3.11 Evaluasi pencapaian APE kabupaten Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dorongan dan motivasi dari stakeholders yang mendukung pencapaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya.
2. Program yang ada di OPD sebagian telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.
3. Sudah ada data pendukung pencapaian Pelaksanaan Program dan kegiatan yang sistematis dalam bentuk buku Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Payakumbuh Tahun 2016.
4. Sudah tersusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di sebagian OPD meskipun masih sangat terbatas.
5. Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang PUG melalui rencana aksi Pokja PUG.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja sasaran Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Perhitungan Indeks membutuhkan banyak koordinasi Lintas Sektor. Peran dan intervensi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana bersifat terbatas sesuai dengan Tupoksi OPD sebagai pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang erat antar perangkat daerah terkait.
2. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengimplementasikan PUG dan PPRG di Kota Payakumbuh. Sehingga dibutuhkan pelatihan SDM untuk memahami konsep dan pengimplementasian PPRG.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Sasaran Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks/skors	98,52	98,53	100,01	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	87.709.000	78.478.208	89.48%
		1.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks/skors	61,76	61,99	100,47	2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	368.163.000	361.226.853	98.12%
		1.3	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	Utama	100	3	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	30.215.000	28.340.360	93.80%
								4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	471.826.800	464.934.087	98.54
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR</b>							<b>100,16</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>957.913.800</b>	<b>932.979.508</b>

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Mendorong koordinasi dan penyelarasan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Kota Payakumbuh dengan meupayakan dan memaksimalkan program program utama yang mendukung pencapaian IPG dan IDG.
2. Memaksimalkan potensi Program dan kegiatan pada perangkat daerah Kota Payakumbuh berdasarkan prioritas dan yang memiliki intervensi / kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender secara agregat keseluruhan maupun secara masing-masing komposit penyusun IPG dan IDG seperti pada Dinas Kesehatan , Dinas Pendidikan , Dinas Tenaga Kerja , Dinas Perindustrian , Dinas Sosial, Kantor Kesbangpol, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan didukung oleh program Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan dengan kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah, Pemberdayaan gerakan PKK, Pembinaan Organisasi Perempuan. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Meningkatnya kualitas perencanaan yang responsif gender, Meningkatnya kesejahteraan keluarga, Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

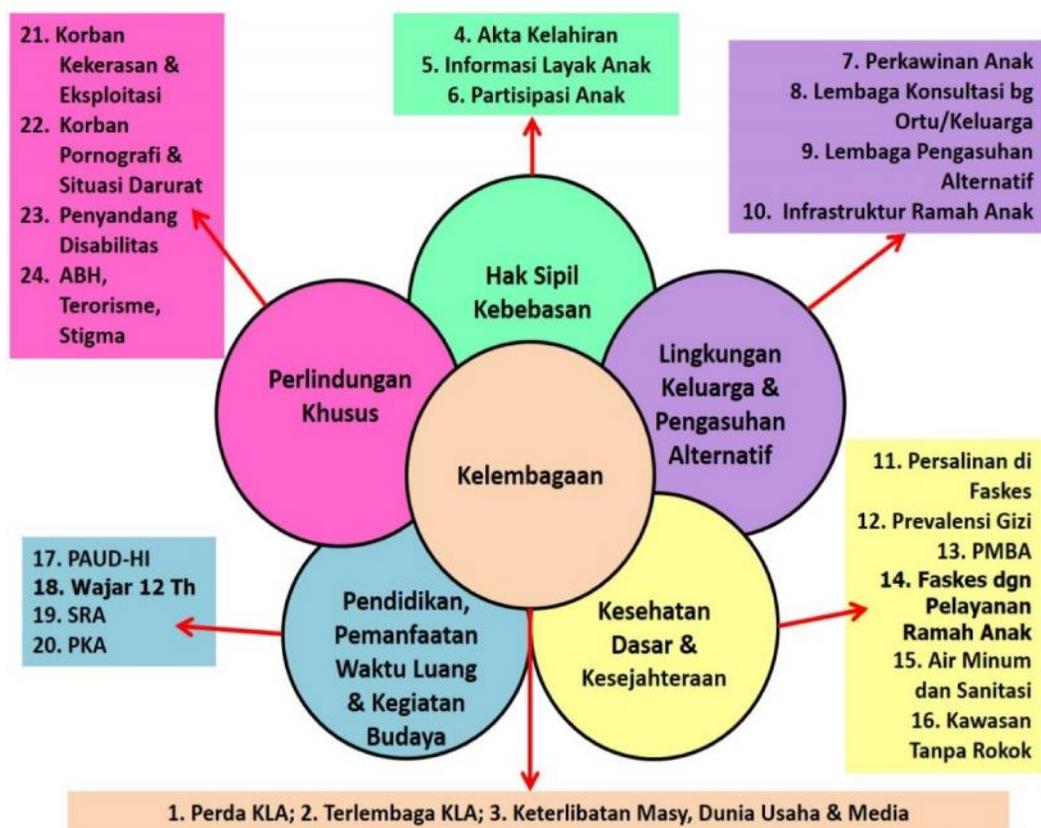
**Tabel 3.5**  
**Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Kegiatan	Output	Menunjang /Kurang
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	87.709.000	78.478.208	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Jumlah peserta pelatihan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Menunjang

2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	368.163.000	361.226.853	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Menunjang
3	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	30.215.000	28.340.360	Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik dan Lembaga Legislatif	Jumlah Perempuan yang mengikuti Kegiatan Kaukus Perempuan Politik Kota Payakumbuh	Menunjang
4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	471.826.800	464.934.087	Pemberdayaan Gerakan PKK	Jumlah Kelembagaan PUG	Menunjang

## Sasaran 2 Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Kategori pencapaian Kota Layak Anak terdiri dari untuk mengimplementasikan Kota Layak Anak harus memenuhi 24 indikator Kota Layak Anak yang tergabung kedalam 5 kluster dan 1 kelembagaan. Untuk Kota Payakumbuh sebagai Pemerintah Kota dibebankan hanya 22 indikator Kota Layak Anak, sementara pemenuhan 24 indikator Kota Layak Anak diemban oleh Pemerintah Propinsi. Penilaian Kota Layak Anak dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kabupaten/Kota se-Indonesia.



**Gambar 3.12 Indikator Kota Layak Anak**

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini menegaskan bahwa titik berat Kota Layak Anak bukan pada pencapaian nilai Kota Layak Anak semata, tetapi lebih kepada pencapaian indikator-indikator yang mencerminkan kinerja yang harus dipenuhi.

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Satuan	Tahun 2018		%	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2018 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Kategori	Pratama	Pratama	100	Nindya	-
Rata-rata Capaian Kinerja						100		

Sasaran meningkatnya Meningkatkan Implementasi Kota Layak Anak dapat dilihat dari 1 ( satu ) indikator, sebagai berikut :

1. Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)

Merupakan tingkatan pencapaian dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA. Kategori capaian Kota Layak Anak terdiri dari kategori sebagai berikut :Pratama, Madya, Nindya, Utama, Kota Layak Anak. Untuk Kota Payakumbuh, pencapaian Kota Layak Anak berada pada kategori Pratama pada tahun 2013, 2015,2017, 2018. Meskipun pencapaian Kategori capaian Kota Layak Anak masih berada pada kategori pratama bukan berarti tidak terjadi peningkatan dalam pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagai pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagai leading sector Kota layak Anak terus melakukan penguatan program dan kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sinergitas dengan instansi pemerintah dan stakeholder lainnya agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pencapaian indikator Kota layak Anak diantaranya penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang lebih dioptimalkan melalui lembaga P2TP2A. Melalui P2TP2A tercatat pada tahun 2018 telah ditangani sebanyak 2 kasus kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan penanganan sesuai dengan tugas dan fungsi P2TP2A. P2TP2A juga telah melakukan upaya pendampingan korban kekerasan sebagai bentuk upaya hadirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melalui perpanjangan tangan P2TP2A. Disamping itu infrastruktur ramah anak ditingkatkan dengan berkolaborasi dengan PU.

Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan mulai menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) berusia kurang dari 17 tahun yang merupakan bagian dari upaya menciptakan kota layak anak. KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota itu. penerbitan KIA ini agar pemerintah bisa menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa yang bermartabat. Proses pengurusan dan penerbitan KIA untuk anak usia nol hingga lima tahun sekaligus akan diterbitkan pula akta kelahiran anak dan juga kartu keluarga (KK) orang tua. Hal itu disebabkan penerbitan KIA dilakukan setelah penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai dasar penerbitan akta kelahiran dan KK, ".Saat ini terdapat sekitar 47.000 jiwa yang berhak mendapatkan KIA di Kota Payakumbuh berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan (diringkas dari <https://www.sumbarfokus.com/media.php?module=detailberita&judul=pemkopayakumbuh-luncurkan-kartu-identitas-anak>)

Disamping itu dalam rangka pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana juga terus berupaya meningkatkan peran dan partisipasi dari anak –melalui Forum anak agar dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya melibatkan anak dalam hal ini termasuk peran serta anak dalam pembangunan diwadahi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ditingkat Kecamatan, OPD, dan di Tingkat Kota Payakumbuh. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana perwakilan pemerintah untuk mendorong *stakeholder* di masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan agar lebih terbuka perspektif hak anak. Menekankan manfaat dari partisipasi forum anak merupakan bagian dari keberlangsungan pembangunan yang sehat dan bermanfaat bagi generasi bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu Forum Anak ini sangat penting untuk terus dikembangkan dan dibina agar berperan sebagai wadah perhimpunan anak yang berkualitas dan sebagai wadah aspirasi hak anak .



**Gambar 3.13 Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan daerah Di Tk Kota Payakumbuh Tahun 2018**



**Gambar 3.14 Piagam penghargaan KLA kategori Pratama Tahun 2018**



**Gambar 3.15** Trophy KLA kategori Pratama tahun 2018



**Gambar 3.16** Kadis DP3AP2KB menerima penganugerahan Kota Layak Anak Tahun 2018

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya implementasi kota layak anak (KLA) disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dorongan dan motivasi dari stakeholders yang mendukung pencapaian kategori Pratama Kota Layak Anak (KLA)



**Gambar 3.17 Peran Stakeholders dalam Pencapaian Kategori KLA**

2. Program yang ada di OPD telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.



**Gambar 3.18 Ruang bermain anak DP3AP2KB**



**Gambar 3.19 Partisipasi anak dalam hari anak nasional, dengan berbagai event dari anak, oleh anak, dan untuk anak**



**Gambar 3.20 Bidang PA studi tiru ke Dinas Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dalam rangka upaya percepatan pemenuhan indikator kota layak anak**

3. Telah terbentuknya sekolah ramah anak.



**Gambar 3.21 Kunjungan Sekolah Ramah Anak**



**Gambar 3.22 Sekolah Ramah Anak MAN 2 Kota Payakumbuh**

4. Telah terbentuknya puskesmas ramah anak.
5. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat Kota dan Kecamatan.



**Gambar 3.23 Forum anak kecamatan melakukan kegiatan di lapangan didampingi Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh**

6. Telah direncanakannya PATBM (Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjamin perlindungan terhadap anak ditengah masyarakat lebih tinggi.

Faktor Penghambat :

1. Masih minimnya jumlah kebijakan tentang hak dan perlindungan anak sehingga mengharuskan OPD pengampu urusan untuk membuat perencanaan kebijakan yang terkait.
2. Minimnya konsultasi yang dilakukan OPD ke daerah lain yang telah memiliki kebijakan tentang hak dan perlindungan anak dikarenakan keterbatasan anggaran pada bidang perlindungan anak.
3. Keterbatasan anggaran APBD untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan terkait. Hal ini mengakibatkan tidak semua program kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan dapat dilaksanakan.



**Gambar 3.24**  
**Penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak Tahun 2018**

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7

## Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak	1. Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Pratama	Pratama	100	1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	48.308.620	42.351.906	87.66
							2 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	58.600.000	57.852.644	98.72
							<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>		<b>100</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Memperkuat dukungan pengimplementasian indikator-indikator Kota Layak Anak (KLA).
2. Melakukan kajian tentang kebijakan-kebijakan strategis terkait hak dan perlindungan anak.
3. Mengadopsi kebijakan terkait hak dan perlindungan anak didaerah lain yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di daerah dengan memperhatikan daerah.
4. Membuat Peraturan walikota terkait perlindungan Perempuan dan perlindungan anak sebagai tindak lanjut atas pembentukan Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak
5. Membuat konsep *Grand Design* Kota layak anak demi mempercepat realisasi pencapaian indikator Kota Layak Anak

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	35.813.620	35.528.556	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kota Layak Anak Jumlah pelatihan P2TP2A	Baik
		Pengembangan Sistem informasi Gender dan Anak	12.495.000	6.823.350	Jumlah Dokumen Profil Data Gender & Anak yang disusun	Baik
2	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan	Sosialisasi terkait dengan Perlindungan Anak	58.600.000	57.852.644	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial	Baik

### Sasaran 3

Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak**  
**Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Satuan	Tahun 2018		%	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2018 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Persentase Kekerasan terhadap perempuan	0.013	Persentase	0.092	0.0395	157	0.04	98.75%
2	Persentase Kekerasan terhadap anak	0.057	Persentase	0.061	0.0385	137	0.0263	146,39 %
3	Persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	95	Persentase	100	100	105	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja						133		

Sasaran Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat dilihat dari 3 ( tiga ) indikator, sebagai berikut :

1. Persentase Kekerasan terhadap perempuan
2. Persentase Kekerasan terhadap anak
3. Persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO

Persentase kekerasan terhadap perempuan ditargetkan sebesar 0,092 berdasarkan rata rata kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2013 – 2017 sebanyak 127 kasus, sementara proyeksi jumlah penduduk perempuan Kota Payakumbuh Tahun 2018 sebanyak 47.303 jiwa ( data proyeksi dari PDA 2018 BPS). Pada tahun 2018 terjadi 19 kasus kekerasan terhadap perempuan, apabila proyeksi jumlah penduduk perempuan tahun 2017 diproyeksikan 48.125\* jiwa ( data proyeksi dari PDA 2018 BPS) maka realisasi persentase kekerasan terhadap perempuan menjadi sebesar 0,0395. Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kekerasan terhadap perempuan melebihi target Perjanjaian Kinerja yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 157% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Persentase kekerasan terhadap anak ditargetkan sebesar 0,061 berdasarkan rata-rata kasus kekerasan terhadap anak dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2013 – 2018 sebanyak 120 kasus, dengan jumlah anak Kota Payakumbuh Tahun 2018 sebanyak 38.559 anak. Pada tahun 2018 terjadi 15 kasus kekerasan terhadap anak, apabila proyeksi jumlah anak tahun 2018 diproyeksikan 38.921 anak\* ( data proyeksi dari PDA 2018 BPS) maka realisasi persentase kekerasan terhadap anak terealisasi sebesar 0,0385 melebihi dari target 0,061, meskipun secara persentase pencapaiannya sebesar 137%.

- Capaian kinerja sasaran Persentase Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Output program tersebut antara lain Meningkatnya pemahaman pelatih (LPM & PKK) dalam pelayanan dan pendampingan korban kekerasan. Capaian kinerja sasaran Persentase Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didukung oleh kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Output kegiatan tersebut antara lain Meningkatnya persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Dan Capaian kinerja sasaran Persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO adalah menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami peningkatan dan mencapai realisasi sesuai dengan harapan karena turut didukung oleh Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh dan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh ke Seluruh SLTA dan SLTP, ke OPD dan ke Organisasi Perempuan se- Kota Payakumbuh. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak. Disamping itu melalui momentum pelaksanaan peringatan hari ibu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak melakukan himbauan agar seluruh Stakeholders yang terkait dapat bersama-sama mendukung upaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO)

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya komitmen dari pimpinan (Kepala Daerah) melalui Surat Keputusan P2TP2A yang terdiri dari berbagai unsur terkait.
2. Adanya partisipasi aktif dari Tim P2TP2A dalam melakukan pendampingan kasus terhadap pengaduan yang masuk ke P2TP2A



**Gambar 3.25 Pendampingan Pengaduan Kasus Kekerasan, ditindaklanjuti langsung oleh ketua pengurus Ibu Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2018**



**Gambar 3.26 Pendampingan Pengaduan Kasus Kekerasan P2TP2A Kota Payakumbuh oleh Kabid Perlindungan Anak DP3Ap2KB beserta tim Tahun 2018**

3. Adanya dorongan dan motivasi dari *stakeholder* yang mendukung pencapaian Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak.



**Gambar 3.27 Diversi P2TP2A Kota Payakumbuh Tahun 2018**



**Gambar 3.28 Stakeholder terkait P2TP2A Kota Payakumbuh Tahun 2018**

4. Program yang ada di OPD telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.



**Gambar 3.29 Sosialisasi P2TP2A Kota Payakumbuh Tahun 2018 oleh**

## DP3A&P2KB dengan OPD dan stakeholder lainnya

5. Masih cukup tingginya pengawasan sosial dari masyarakat sehingga dapat mencegah/meminimalisir kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### Faktor Penghambat

1. Masih minimnya jumlah kebijakan tentang hak dan perlindungan anak sehingga mengharuskan OPD pengampu urusan untuk membuat perencanaan kebijakan yang terkait.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar *stakeholder* mengenai arti penting dan peran perempuan dan anak.
3. Masih terbatasnya informasi di masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1.	Persentase Kekerasan terhadap perempuan	%	0.092	0.0395	157	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	82.557.000	80.721.820	97.78
		2.	Persentase Kekerasan terhadap anak	%	0.061	0.0385	137					
		3.	Persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	%	95	100	105					
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR</b>					<b>133</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>82.557.000</b>	<b>80.721.820</b>	<b>97.78</b>	

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	29.983.000	23.595.300	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Baik

**Sasaran 4**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana**

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Satuan	Tahun 2018		%	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2018 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Contraceptive Prevelency Ratio (CPR)	71.14	Rasio	76.80	69.07	89.93	77,1	89.59 %
Rata-rata Capaian Kinerja						89.93		

Sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut :

Capaian kinerja indikator Contraceptive Prevelency Ratio (CPR) dengan pencapaian tidak mencapai target Perjanjaian Kinerja yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 89,93% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.hal yang menyebabkan tidak tercapainya Capaian CPR tahun 2018 disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasangan yang tidak produktif (baik laki-laki maupun perempuan) sehingga menurunkan angka CPR. Pengukuran indikator kinerja CPR berdasarkan data dari statistik rutin Program KKBPK Dinas P3A&P2KB Kota Payakumbuh.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan momentum strategis Keluarga Berencana, melalui pelaksanaan PKK-KB-Kes, TNI-KB-Kes di kota Payakumbuh yang

merupakan bagian momentum strategis untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan program keluarga berencana dan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Dari pelaksanaan PKK-KB-Kes, TNI-KB-Kes diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan PKK-KB, TNI-KB, pelaksanaan posyandu, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan bersih sehat di Kota Payakumbuh, dengan memegang prinsip kebersamaan, keterpaduan dan pelayanan yang berkualitas serta mendorong pencapaian sasaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya koordinasi dengan BKKBN dan BKKBN Perwakilan Sumatera Barat sebagai instansi vertikal pengampu urusan Kependudukan Keluarga Brencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
2. Adanya dorongan dan motivasi dari stakeholders yang mendukung pencapaian sasaran.



**Gambar 3.30 peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46, Pencanaan PKK Keluarga Berencana Kesehatan (PKK-KB-Kes), peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-25 dan Launching Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) kota Payakumbuh tahun 2018**

3. Program yang ada di OPD telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program Keluarga Berencana.



**Gambar 3.31 Pelayanan Peserta KB**



**Gambar 3.32 Peserta KB Aktif**

5. Telah terbentuknya Kampung KB.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan KB oleh petugas kesehatan di Fasilitas Kesehatan.



Gambar 33 Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

7. Adanya peningkatan kontribusi dari klinik KB swasta dalam pemakaian alat kontrasepsi.

#### Faktor Penghambat

1. Masih rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan / pemakai kontrasepsi KB.
2. Keterbatasan Tenaga Penyuluh (PLKB / PKB ) untuk operasional di Lapangan.
3. Terdapat pasangan usia subur yang Drop Out (DO).
4. Pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi, atau ingin anak ditunda tapi belum mengikuti Program KB

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	1.	Contraceptive Prevelency Ratio	Rasio	76.80	69.07	<b>89.93</b>	1 Program Keluarga Berencana	2.771.622.769	2.328.029.639	83.99
								2 Program Pelayanan Kontrasepsi	29.183.500	28.102.200	96.29
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR</b>						<b>89.93</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>2.800.806.269</b>	<b>2.356.131.839</b>

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb:

1. Meningkatkan kualitas layanan program keluarga berencana, termasuk menjamin pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
2. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
3. Menyajikan pelaporan data yang handal dan melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan.

Capaian kinerja sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga didukung oleh Program Keluarga Berencana Output program antara lain Meningkatkan keikutsertaan ber-KB, Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU output program adalah Meningkatnya kualitas kelembagaan Posyandu dan PMT-AS.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja sasaran 3**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Program Keluarga Berencana	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	56.740.000	42.147.900	Persentase peserta KB dibagi jumlah PUS x 100	Baik
		Pembinaan Keluarga Berencana	237.102.000	237.051.400	Pembinaan KB kepada calon akseptor KB oleh kader KB Jumlah pembayaran honor Kader KB	Baik
		Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	1.269.630.769	1.225.971.700	Jumlah pengadaan peralatan alat-alat kedokteran kebidanan dan kebutuhan saranaprasarana program KB lainnya	Baik
		Peningkatan Operasional Keluarga Berencana	1.208.150.000	822.858.639	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapat dukungan operasional	Baik

2	Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan Konseling KB	29.183.500	28.102.200	Jumlah klinik KB yang memberikan pelayanan konseling KB kepada akseptor	Baik
---	-------------------------------	------------------------	------------	------------	---	------

### Sasaran 5

Meningkatkan cakupan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.15**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 5**  
**Meningkatkan cakupan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Satuan	Tahun 2018		%	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2018 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya cakupan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)	75	%	74	74	100	90	82,22%
Rata-rata Capaian Kinerja						100		

Sasaran Meningkatkan Ketahanan Keluarga dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja meningkatnya cakupan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah dengan pencapaian sesuai target Perjanjaian Kinerja yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Program KKBPK sebagai program dasar pembangunan yang berbasis keluarga menjadikan Keluarga sebagai sasaran utama. Program ini merupakan transformasi dari program Keluarga Berencana merupakan salah satu bukti bahwa konsentrasi pemerintah dalam pembangunan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas penduduk. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga Non Kementerian diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Salah satu syarat yang harus dikembangkan dalam keluarga untuk menjadi bahagia dan sejahtera adalah

setiap keluarga harus mampu menghayati, memiliki dan berperan dalam 8 (delapan) fungsi keluarga agar menjadi keluarga berkualitas. Salah satu sumber kesuksesan Program KKBPK adalah dengan adanya Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB dan para Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan. Penyuluh KKBPK memiliki peran sebagai penggerak yang handal untuk masyarakat agar dapat dukungan pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK. Dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya, Penyuluh KKBPK telah memiliki mekanisme kerja yang jelas, yaitu 10 Langkah. Diawali dengan langkah (1) Pendekatan Tokoh Formal; (2) Pendataan dan Pemetaan; (3) Pendekatan Tokoh Informal; (4) Pembentukan Kesepakatan; (5) Pemantapan Kesepakatan; (6) KIE kepada masyarakat; (7) Pembentukan Group Pelopor; (8) Pelayanan KB; (9) Pembinaan Peserta KB; dan (10) Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan. Langkah Kerja tersebut menjadikan kunci keberhasilan para Penyuluh KKBPK untuk berkontribusi terhadap pembangunan di desa/kelurahan serta pembangunan nasional secara umumnya. Pada lampiran I huruf N Undang-undang No. 23 Tahun 2014, terkait pembagian urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Pusat dalam hal ini BKKBN diberikan kewenangan untuk mengelola tenaga Penyuluh KKBPK sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan untuk mendayagunakan tenaga Penyuluh KKBPK. Pengukuran indikator kinerja cakupan KKBPK diukur melalui data dari DP3A&P2KB Kota Payakumbuh.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dorongan dan motivasi dari stakeholders yang mendukung pencapaian program KKBPK



**Gambar 3.34 Koordinasi dengan BKKBN sebagai instansi vertikal yang menaungi KKBPK tahun 2018**



**Gambar 3.35 Pendataan / penyuluhan kader Program KKBPK**

2. Program yang ada di OPD telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.



**Gambar 3.36 Kader PPKBD, SUB PPKBD dan BKB Payakumbuh Selatan mengikuti rapat koordinasi / pelaporan di Balai Penyuluhan KB Payakumbuh Selatan**



**Gambar 3.37 Penyuluhan Program KKBPK Oleh PKB**



**Gambar 3.38 Kompetensi dalam Pemetaan Perkembangan Program KKBPK**

3. Telah terbentuknya Koalisi Kependudukan Kota Payakumbuh, berperan sebagai forum komunikasi dan wadah pertemuan untuk membicarakan dan membahas isu-isu strategis mengenai isu-isu kependudukan terkini, dan isu-isu kependudukan yang berkaitan dengan permasalahan, peluang dan tantangan kependudukan di Kota Payakumbuh.



**Gambar 3.39 Pembentukan Koalisi Kependudukan Kota Payakumbuh untuk sebagai sarana meningkatkan kemitraan, dan koordinasi lintas sektor dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan mewujudkan keselarasan program pembangunan dari perspektif kependudukan dan membahas isu- isu strategis tentang pengendalian penduduk dan kependudukan**

4. Telah terbentuknya Kampung KB di 5 Kecamatan sebanyak 6 Kampung KB sehingga mempercepat penyebaran informasi dan program KB ditengah masyarakat.



**Gambar 3.40 Kampung KB di Kecamatan Payakumbuh Timur**

5. Penambahan Pembentukan Kelompok Tribina di Kecamatan untuk memperkuat ketahanan keluarga.



**Gambar 3.41 Bina Kelompok Remaja (BKR) PIK Remaja Mudo Mandiri  
Kota Payakumbuh**

#### Faktor Penghambat

1. Masih minimnya dana operasional bagi kader Posyandu, Kader KB, Kader Bina Keluarga yang dianggarkan.
2. Masih rendahnya minat generasi muda untuk mengikuti kegiatan bernuansa genre.
3. Masih lemahnya pemahaman, minat dan tanggung jawab dalam kelompok UPPKS mengenai ketahanan keuangan keluarga.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	1. Meningkatnya cakupan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPk)	%	74	74	100	1 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	340.149.100	339.351.120	99.77
							2 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU	802.609.100	677.901.600	84.46
							<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>			<b>100</b>

Capaian kinerja sasaran Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) didukung oleh Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Output program dan kegiatan antara lain Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**

**Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja sasaran 5**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	373.998.500	371.887.300	Persentase BKB Aktif	Baik
2	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU	Fasilitasi Penyelenggaraan PMTAS dan Posyandu	802.609.100	677.901.600	Persentase posyandu dengan strata mandiri	

**Sasaran 6**

**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.18**

**Analisis Pencapaian Sasaran 6  
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Satuan	Tahun 2018		%	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2018 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	BB	Nilai	BB	BB	100	A	-
	Rata-rata Capaian Kinerja					100		

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:  
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh

menuju peningkatan mutu pelayanan sebagai bagian reformasi birokrasi dilakukan dengan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa implementasi dari SAKIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu kinerja, anggaran dan reformasi birokrasi. Dijelaskan pada Pepres tersebut, SAKIP harus dilaksanakan secara selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. SAKIP dilaksanakan dengan sistem berjenjang yaitu meliputi entitas kinerja satuan unit, selanjutnya ke tingkat entitas unit organisasi dan diimplementasikan secara keseluruhan ditingkat kementerian atau lembaga negara. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara terpadu meliputi :

1. Rencana strategis
2. Perjanjian kinerja
3. Pengukuran kinerja
4. Pengelolaan data kinerja
5. Pelaporan kinerja
6. Reviu dan evaluasi kinerja

Dalam penyusunan rencana strategis tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh berupaya menyusun perencanaan berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dari isu strategis yang diformulasikan melalui tabel skoring permasalahan yang ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh sesuai tugas pokok dan fungsi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan RPJMD yang dapat terukur dan akuntabel, sehingga dalam penyusunan LKJIP target yang ditetapkan selaras dengan dokumen perencanaan (RPJMD dan RENSTRA) dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Berbagai penyesuaian dilakukan terhadap dokumen SAKIP agar tercapai keselarasan antar dokumen. Tujuan

penyelarasan ini adalah untuk mewujudkan penjaminan mutu pelayanan dan akuntabilitas dan reformasi birokrasi yang akuntabel sebagai bentuk langkah nyata implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Pencapaian Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2018 bila dibandingkan dengan pencapaian Tahun lalu tetap pada kategori BB, namun meskipun demikian telah terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam proses perencanaan dan pelaporan akuntabilitas. Hal ini didorong oleh keterlibatan langsung OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagai OPD yang menjadi sampling evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Payakumbuh. Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dilakukan demi mewujudkan SAKIP yang berkualitas. Peningkatan indikator kinerja dari nilai AKIP oleh Inspektorat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Dorongan dari Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang ditandai dengan Komitmen Kepala Daerah ,diterbitkannya peraturan daerah, peraturan walikota, surat edaran dan kebijakan terkait lainnya sehubungan dengan upaya meningkatkan kualitas dokumen dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).



**Gambar 3.42 Walikota Payakumbuh Bapak Riza Falepi menerima SAKIP BB , sebagai bukti nyata komitmen Kepala Daerah Kota Payakumbuh dalam perbaikan penyelarasan dan penyempurnaan SAKIP pemerintah Kota Payakumbuh.**

2. Adanya komitmen dari dinas terutama komitmen dari dan pimpinan SKPD (kepala dinas) agar setiap dokumen perencanaan disusun dengan memperhatikan konsistensi penyajian data dan penyesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen RPJMD.



**Gambar 3.43 Rapat pimpinan OPD terkait SAKIP**



### **Gambar 3.44 Cover Renstra 2017-2022**

3. Adanya upaya dari masing-masing OPD, bagian / bidang terkait untuk meniadakan komitmen dari kepala dinas dalam membantu menyusun dokumen perencanaan yang konsisten.



**Gambar 45 Rapat Sakip pimpinan OPD**



**Gambar 46 Intensifikasi Sakip pada DP3AP2KB**



**Gambar 47 Rapat intensifikasi sakis OPD**

#### Faktor Penghambat

1. Masih terbatasnya jumlah perencana di OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Perencana di perangkat daerah masih merangkap tugas pokok dan fungsi lainnya dikarenakan keterbatasan jumlah ASN.
2. Masih terbatasnya pemahaman ASN mengenai tujuan dan arti penting sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, sehingga dibutuhkan penyampaian informasi mengenai SAKIP dan penguatan kebijakan tentang pelaksanaan dan implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Hal ini terus dilakukan guna memastikan perbaikan berkelanjutan terhadap komitmen dan tanggungjawab semua ASN dan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah selaras dengan sasaran Dinas dan akuntabel.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dibandingkan dengan

realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.19**  
**Tingkat Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB	A	100	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	681.349.048	656.737.320	96.38
							2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	202.478.500	173.861.684	85.86
							3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.995.300	25.069.000	96.43
							4	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.214.400	10.927.905	97.44
							<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>				
								921.037.248	866.595.909	94.08	

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Output program dan kegiatan antara lain meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasana aparatur, disiplin aparatur dan kualitas pelaporan berbagai kegiatan pembangunan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.20**

**Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja sasaran 5**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.651.000	1.649.000	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli	Baik
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000	44.798.227	Jumlah rekening jasa kantor yang dibayarkan	Baik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.500.000	9.608.400	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	Baik
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.088.000	152.173.500	Jumlah pajaknya pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan	Baik
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.515.000	7.515.000	Jumlah jasanya dan Pengelola Barang Milik Daerah	Baik
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000	5.725.000	Jumlah bahan bahan kebersihan kantor yang dibeli	Baik
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.261.000	20.237.000	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Baik
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.099.750	13.069.625	Jumlah ATK yang Disediakan	Baik
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.875.000	2.875.000	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Baik
		Penyediaan peralatan dan	7.500.000	7.050.000	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Baik
				Jumlah pengadaan peralatan kantor	Baik	

		perlengkapan kantor			Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Baik
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.821.550	3.480.000		
		Penyediaan makanan dan minuman	8.857.500	8.857.200	Jumlah porsi makanan dan snack yang disediakan dalam rapat	Baik
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.590.000	118.812.000	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	Baik
		Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	269.590.248	260.887.368	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang dibayarkan honorinya	Baik
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeleur	10.000.000	9.900.0000	Jumlah Mebeleur yang dibeli	Baik
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	10.000.000	9.648.100	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	Baik
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	182.478.500	154.313.584	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat	Baik
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.998.300	25.069.000	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	Baik
4	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.194.000	3.163.330	Jumlah Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang disusun	Baik
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	3.690.500	3.478.675	Jumlah Laporan Perencanaan kinerja	Baik
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.329.900	4.285.900	Jumlah Kegiatan yang di monitoring	Baik

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.9.302.229.902,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.048.804.681,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 86.53%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana kondisi anggaran terdapat Silpa Rp.1.253.425.221,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21**

**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Kota Payakumbuh Tahun 2018**

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan berkelanjutan.	2.068.419.668	1.980.501.787	95.74
2	Mewujudkan Keluarga Berencana yang sejahtera , berkualitas dan mandiri.	3.943.564.469	3.373.384.559	85.54
	<b>Jumlah</b>	<b>6.011.984.137</b>	<b>5.353.886.346</b>	<b>89.05</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh pada Tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.22**

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>Misi 1,</b>			1.980.501.787	95.74
1	Melebihi/Melampaui Target	5	50%		
2	Sesuai Target	3	50%		
3	Belum Mencapai Target	0	0 %		
Jumlah			100 %		
<b>B.</b>	<b>Misi 2,</b>			3.373.384.559	85.54
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50%		
2	Sesuai Target	0			
3	Belum Mencapai Target	1	50 %		
Jumlah			100 %		

Pencapaian Misi pada Tahun 2018 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut:

**Tabel 3.23**

**Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh 2017-2022**

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-		Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1	2 dst		
A.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	15.814.975.020	1.134.905.869	2.068.419.668	3.203.325.537	20.25
B.	Mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera, berkualitas dan mandiri	22.648.924.215	1.478.072.465	2.303.385.650	3.781.458.115	16.70

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

### 3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

#### 1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Kategori Utama Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2018
2	Kategori Pratama Kabupaten / Kota Layak Anak Tahun 2018	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2018
3	Pakarti Madya I, Pemenang Terbaik UP2K PKK Tingkat Nasional Tahun 2018	PKK Pusat	2018

#### 2. Prestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Harapan II Kategori Kota Pelaksana terbaik gerakan PKK bidang pola asuh anak dan remaja Tk. Propinsi Sumatera Barat	Gubernur Sumatera Barat	2018
2	Harapan I Pelaksana terbaik gerakan PKK bidang kelompok UP2K - PKK Tk. Provinsi Sumatera Barat	PKK Provinsi Sumatera Barat	2018
3	Terbaik I Pelaksana terbaik gerakan PKK bidang tertib administrasi PKK Tk. Provinsi Sumatera Barat	PKK Provinsi Sumatera Barat	2018
4	Terbaik III Lomba Cipta Menu PMT-AS Tk. Provinsi Sumatera Barat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumatera Barat	2018

5	Terbaik III Lomba Kader Posyandu Berprestasi Integrasi BKB PAUD Tk. Provinsi Sumatera Barat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumatera Barat	2018
6	Terbaik V Lomba Pengelola UPPKS Tk. Provinsi Sumatera Barat	BKKBN Perwakilan Prov. Sumatera Barat	2018
7	Terbaik I Lomba Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK – Remaja) Jalur Masyarakat Tk. Prov. Sumatera Barat	BKKBN Perwakilan Prov. Sumatera Barat	2018
8	Terbaik III Lomba Pasangan KB Lestari 15 Tahun Tk. Prov. Sumatera Barat	BKKBN Perwakilan Prov. Sumatera Barat	2018
9	Terbaik II Lomba Pidato Kependudukan Tk. Prov. Sumatera Barat	BKKBN Perwakilan Prov. Sumatera Barat	2018
10	Terbaik III Lomba Pendataan Keluarga Jambore Program KKBPK bagi PKB/PLKB dan IMP Terpadu Tk. Prov. Sumatera Barat	BKKBN Perwakilan Prov. Sumatera Barat	2018
11	Terbaik II Lomba Karya Tulis Ilmiah Kependudukan Tk. Prov. Sumatera Barat	BKKBN Perwakilan Prov. Sumatera Barat	2018

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LkjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai :

Sasaran 1 Indikator 1 dengan nilai 100.01% atau melebihi target

Sasaran 1 indikator 2 dengan nilai 100.47 % atau melebihi target

Sasaran 1 indikator 3 dengan nilai 100 % atau sesuai target

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai dengan nilai 100 % atau sesuai target

Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai :

Sasaran 3 indikator 1 dengan nilai 157% atau melebihi target

Sasaran 3 indikator 2 dengan nilai 137% atau melebihi target

Sasaran 3 indikator 3 dengan nilai 105 % atau sesuai target

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 89.93 % atau tidak sesuai target

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau sesuai target

Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau sesuai target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 (enam) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi dan sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, kecuali untuk sasaran 4 (empat) terdapat 1 indikator yang tidak sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja karena bertambahnya jumlah pasangan dalam usia yang tidak produktif.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.9.302.229.902,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.048.804.681,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 86.53%, (rincian anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.011.984.137,- dengan penyerapan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.353.886.346,- atau dengan serapan dana sebesar 89.05 %). Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp.1.253.425.221,- Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh 2017-2022 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai :

Sasaran 1 Indikator 1 dengan nilai 100.01 % atau melebihi target

Sasaran 1 indikator 2 dengan nilai 100.47 % atau melebihi target

Sasaran 1 indikator 3 dengan nilai 100 % atau sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau sangat baik

Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai :

Sasaran 3 indikator 1 dengan nilai 157% atau melebihi target

Sasaran 3 indikator 2 dengan nilai 137 % atau melebihi target

Sasaran 3 indikator 3 dengan nilai 105 % atau sangat baik  
Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 89.93 % atau baik  
Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau sangat baik  
Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau sangat baik

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.6.011.984.137,- (Enam Miliyar Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh adalah 89.05 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2019



KEPALA

**Drs. SYANNADEL KHAIRI**  
NIP. 19610903 198703 1 003